

## **ABSTRAK**

### **POLA KOALISI PARTAI BERBASIS ISLAM (STUDI KASUS PROSES REKRUITMEN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG 2010 – 2015)**

**Oleh**

**DARMAWAN PURBA**

Pemilihan kepala daerah selama ini diwarnai pembentukan koalisi dalam mengusung pasangan calon walikota dan wakil walikota, ironisnya koalisi yang terbentuk menunjukkan adanya *mixing* ideologi. Baik partai berbasis Islam maupun partai sekuler. Fenomena politik ini tidak sesuai dengan fungsi ideologi sebagai pengikat tali-tali gerakan politik sejenis. Pada pilkada Bandar Lampung 2010 terdapat sembilan partai berbasis Islam yang selayaknya berkoalisi ternyata tersebar pada ketiga koalisi pasangan calon yang maju melalui jalur partai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) proses koalisi; (2) motif dan pertimbangan berkoalisi; (3) kriteria dan mekanisme rekrutmen; serta (4) hambatan koalisi partai berbasis Islam.

Penelitian dilaksanakan di sembilan partai berbasis Islam, yaitu: PPP, PAN, PKS, PKB, PMB, PBR, PBB, PPNUI dan PKNU. Informan penelitian adalah ketua umum partai politik berbasis Islam dan informan dari media cetak yaitu Radar Lampung dan Lampung Post sehingga mendapatkan informasi yang berimbang. Informasi dan

data yang terkumpul melalui wawancara mendalam selanjutnya diolah dan dianalisis sampai menghasilkan temuan-temuan baru sebagai hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola koalisi yang dibangun partai-partai berbasis Islam lebih mengedepankan kepentingan yang sama, sehingga pola koalisi yang terjadi cenderung pragmatis dan transaksional. Beberapa indikator temuan tersebut antara lain: (1) partai-partai berbasis Islam belum menerapkan proses pembentukan koalisi secara ideal, hal ini dikarenakan ideologi belum difungsikan sebagai saringan kebijakan; (2) Motif pembentukan koalisi dipengaruhi oleh motif (a) eksistensi diri; (b) kesamaan nilai; dan (c) aktualisasi. Selain itu koalisi juga dipengaruhi terpenuhinya sejumlah kebutuhan dan kepentingan partai; (3) Kriteria dan mekanisme rekrutmen calon tidak selektif dan elitis. (4) Hambatan dalam koalisi partai berbasis Islam karena adanya perbedaan nilai, perbedaan program serta persaingan kepentingan.

Kata kunci : Pemilihan Kepala Daerah, Partai Berbasis Islam, Koalisi